

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir (skripsi) di Universitas Cenderawasih Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka peneliti sangat mengharapkan kesediaan dari Bapak/Ibu agar dapat meluangkan waktu guna mengisi kuesioner yang saya sertakan secara langsung. Dengan ini Saya atas:

Nama : Andy Ken Vannes

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Kuesioner yang saya bagikan merupakan informasi pendukung dalam penelitian yang saya lakukan dengan judul “Faktor-Faktor Pencegahan *Fraud* Pada Distrik Sentani Kabupaten Jayapura”.

Penelitian yang saya lakukan ini bersifat dan bertujuan akademis atau keilmuan semata dan hasil dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan bantuannya Bapak/Ibu dalam memberikan tanggapan berupa jawaban kuesioner.

Hormat Saya

Andy Ken Vannes

Nim. 2019041034064

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : laki-Laki Perempuan
3. Usia : < 25 Tahun 36 - 40 Tahun
 25 - 30 Tahun 41 - 45 Tahun
 31- 35 Tahun > 45 Tahun
4. Nama Kampung :
6. Lokasi Kampung :
7. Pendidikan Formal : SMA S2
 S1 S3
8. Lama Tinggal : <5 Tahun 5-10 Tahun
Di kampung >10 Tahun
9. Lama Menjabat :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda silang (X) untuk setiap pernyataan yang menggambarkan persepsi anda, dimana:

1= Sangat Tidak Setuju (STS)

4= Setuju (S)

2= Tidak Setuju (TS)

5= Sangat Setuju (SS)

3= Kurang Setuju (KS)

GOOD GOVERNANCE (X1)

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
Transparansi (<i>transparency</i>)						
1.	Desa di tempat Bapak/Ibu bekerja mampu menyediakan informasi secara akurat dan dapat diperbandingkan sehingga mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.					
2.	Desa di tempat Bapak/Ibu bekerja dapat menerapkan prinsip keterbukaan.					
Akuntabilitas (<i>accountability</i>)						
3.	Desa di tempat Bapak/Ibu bekerja dapat menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab semua perangkat desa secara jelas dan selaras dengan visi dan misi					
4.	Perangkat Desa di tempat Bapak/Ibu bekerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik					
Responsibilitas (<i>responsibility</i>)						
5.	Desa di tempat Bapak/Ibu bekerja berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap perundang- undangan					
6.	Desa di tempat Bapak/Ibu bekerja melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.					
Independensi (<i>independence</i>)						
7.	Desa di tempat Bapak/Ibu bekerja tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas					

	dari kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan					
8.	Desa Bapak/Ibu pernah menerima atau melakukan suap dalam bentuk apapun					
Kewajaran (<i>fairness</i>)						
9.	Desa di tempat Bapak/Ibu bekerja telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan instansi					
10.	Desa di tempat Bapak/Ibu bekerja memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada masyarakat.					

Sumber: (Paramitha, 2020)

WHISTLEBLOWING SYSTEM (X2)

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya bersedia menyatakan komitmen untuk berpartisipasi aktif melaporkan adanya pelanggaran dan kecurangan					
2.	Saya tidak takut untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi karena ada kebijakan mengenai perlindungan pelapor/ <i>whistleblower</i> dalam <i>Whistleblowing System</i> .					
3.	Saya akan menggunakan nama samaran/anonim jika melaporkan suatu pelanggaran atau kecurangan.					
4.	Saya harus menerima informasi perkembangan penanganan hasil laporan pelanggaran yang saya laporkan.					
5.	Laporan yang saya laporkan harus dilakukan investigasi lebih lanjut.					
6.	Saya menjadi termotivasi untuk melaporkan tindak pelanggaran bukan karena adanya insentif/reward (hadiah).					

Sumber : (Paramitha, 2020)

PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) (Y)

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Desa Bapak/Ibu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.					
2.	Desa Bapak/Ibu melibatkan masyarakat dalam evaluasi program.					
3.	Masyarakat memberikan saran dan kritik terhadap pengawasan program dana desa yang dilakukan di Desa Bapak/Ibu.					
4.	Masyarakat memberikan saran dan kritik terhadap pengendalian program dana desa yang dilakukan di Desa Bapak/Ibu.					
5.	Desa penerima dana desa mempertanggung jawabkan pengelolaan dana kepada masyarakat.					
6.	Desa penerima dana desa mempertanggung jawabkan pengelolaan dana kepada perangkat desa					

Sumber: (Paramitha, 2020)

No.	GOOD CORPORATE GOVERNANCE (X1)										TOTAL
	GCG 1	GCG 2	GCG 3	GCG 4	GCG 5	GCG 6	GCG 7	GCG 8	GCG 9	GCG 10	
1	5	4	5	4	4	5	3	2	4	4	40
2	5	4	5	4	4	5	3	2	4	4	40
3	5	5	5	4	5	4	5	1	4	5	43
4	5	5	5	4	5	4	5	1	4	5	43
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	46
7	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	44
8	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	47
9	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	43
10	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	38
11	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	38
12	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	38
13	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	46
14	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	38
15	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	45
16	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	47
17	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	45
18	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
19	4	4	5	5	4	5	4	1	5	4	41
20	4	4	5	5	5	4	5	2	5	4	43
21	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	40
22	5	5	5	4	5	5	2	1	5	5	42
23	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	46
24	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4	39
25	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	41
26	4	3	3	3	4	4	3	2	4	4	34
27	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	37
28	4	4	4	4	4	3	4	2	2	4	35
29	5	5	5	4	5	5	5	2	5	5	46
30	4	4	4	4	4	5	4	1	5	5	40
31	4	5	3	4	3	3	4	1	3	4	34
32	4	5	4	3	3	4	4	2	5	5	39
33	4	4	3	3	4	4	5	2	4	5	38
34	4	5	4	3	3	4	4	2	5	5	39
35	5	4	4	3	4	5	5	3	5	4	42
36	5	4	4	4	5	4	4	3	3	5	41
37	5	5	4	4	4	4	4	1	4	4	39
38	5	5	4	4	4	4	4	1	4	4	39
39	5	5	4	4	4	4	4	1	4	4	39

40	5	5	4	4	4	4	4	1	4	4	39
41	5	5	4	4	4	4	4	1	4	4	39
42	4	4	4	2	4	4	5	4	2	4	37
43	4	4	4	2	4	4	5	4	2	4	37
44	4	4	4	2	4	4	5	4	2	4	37
45	4	4	4	2	4	4	5	4	2	4	37
46	4	4	4	2	4	4	5	4	2	4	37

No.	WHISTLEBLOWING SYSTEM (x2)						TOTAL
	WBS 1	WBS 2	WBS 3	WBS 4	WBS 5	WBS 6	
1	4	3	2	4	4	3	20
2	4	3	2	4	4	3	20
3	5	5	2	4	4	5	25
4	5	5	2	4	4	5	25
5	5	5	2	5	5	5	27
6	5	4	4	4	5	4	26
7	5	5	2	4	4	2	22
8	3	3	2	4	3	4	19
9	5	5	2	4	4	5	25
10	4	5	2	4	4	4	23
11	4	5	2	4	4	4	23
12	4	5	2	4	4	4	23
13	4	5	5	2	5	5	26
14	4	5	2	4	4	4	23
15	5	4	2	4	5	5	25
16	5	5	2	5	5	5	27
17	5	4	2	4	4	5	24
18	5	5	2	4	4	5	25
19	3	3	2	4	2	3	17
20	5	5	2	4	4	4	24
21	3	5	2	4	4	4	22
22	5	4	4	4	5	4	26
23	5	5	1	5	5	4	25
24	4	4	1	5	5	4	23
25	4	4	2	4	5	4	23
26	4	4	2	3	4	3	20
27	4	4	2	3	4	3	20
28	4	4	2	4	3	4	21
29	5	5	2	4	4	5	25

30	5	4	2	4	5	4	24
31	4	4	2	4	4	5	23
32	5	4	2	4	4	5	24
33	5	5	2	4	4	4	24
34	5	4	2	4	4	5	24
35	5	4	2	4	4	5	24
36	4	4	2	4	4	4	22
37	5	5	2	3	3	5	23
38	5	5	2	3	3	5	23
39	5	5	2	3	3	5	23
40	5	5	2	3	3	5	23
41	5	5	2	3	3	5	23
42	5	4	2	4	5	4	24
43	5	4	2	4	5	4	24
44	5	4	2	4	5	4	24
45	5	4	2	4	5	4	24
46	5	4	2	4	5	4	24

NO.	PENCEGAHAN FRAUD (Y)						TOTAL
	PF 1	PF 2	PF 3	PF 4	PF 5	PF 6	
1	5	4	4	5	5	5	28
2	5	4	4	5	5	5	28
3	5	5	5	4	4	4	27
4	5	5	5	4	4	4	27
5	5	5	4	4	5	5	28
6	5	5	5	4	4	5	28
7	5	4	5	5	5	5	29
8	5	4	4	3	5	5	26
9	5	4	4	4	4	4	25
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	4	4	4	4	24
13	5	5	4	4	5	5	28
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	5	5	5	5	4	28
16	5	4	4	4	4	4	25
17	5	5	5	5	4	4	28
18	5	5	5	4	5	5	29
19	4	4	4	3	4	4	23

20	5	5	5	4	4	5	28
21	4	5	4	4	5	4	26
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	3	5	4	5	4	25
25	4	3	4	5	5	5	26
26	4	3	2	2	4	3	18
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	5	5	5	5	5	5	30
30	5	4	5	4	4	2	24
31	5	4	4	4	3	4	24
32	5	4	4	4	4	4	25
33	5	5	5	5	5	5	30
34	5	4	4	4	4	4	25
35	5	5	5	5	5	5	30
36	5	4	4	5	4	4	26
37	5	4	4	4	4	2	23
38	5	4	4	4	4	2	23
39	5	4	4	4	4	2	23
40	5	4	4	4	4	2	23
41	5	4	4	4	4	2	23
42	5	5	4	4	4	4	26
43	5	5	4	4	4	4	26
44	5	5	4	4	4	4	26
45	5	5	4	4	4	4	26
46	5	5	4	4	4	4	26

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Good Corporate Governance

1. Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa?
2. Apa ada kendala dalam keterbukaan kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?
4. Apa saja jenis laporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?
5. Bagaimana pemerintah desa mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa?

Sumber: (Mutmainna, 2022)

Whistleblowing System

1. Apakah Bapa/Ibu pernah melaporkan suatu tindakan kecurangan di kampung ini dengan menggunakan *whistleblowing System*?
2. Menurut Bapa/Ibu, apa yang mempengaruhi anda dalam melakukan dan tidak melakukan pengaduan atau pelaporan, ketika anda mendapati kecurangan di dalam Kampung ini?
3. Menurut Bapa/Ibu apakah di dalam Kampung ini sudah menanamkan nilai “keterbukaan dan kejujuran” pada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di kampung ini?
4. Menurut Bapa/Ibu, apakah Aparatur Kampung sudah benar-benar berkomitmen dalam mendukung penerapan *whistleblowing* apabila mendapatkan temuan berupa kecurangan dana kampung?
5. Menurut Bapa/Ibu, apakah penerapan *whistleblowing* di dalam Kampung sudah efektif atau belum? Apakah anda mempunyai saran dalam mengembangkan *whistleblowing system* dalam kampung?

Sumber: (Auzan, 2019)

Hasil wawancara bersama beberapa responden, sebagai berikut:

1. Hasil wawancara bersama aparat kampung Ifale mengenai penerapan *Good Corporate Governance*:

a. Bamuskam.

P : Bagaimana pemerintah kampung melaksanakan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana kampung?

N : Sama sekali belum pernah. Selama empat tahun ini saya sebagaimana Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) kami tidak pernah mendapatkan laporan, baik secara lisan maupun tertulis. Nah itu sebabnya beberapa jawaban yang saya berikan lewat kuesioner yang saya dapatkan itu saya berikan karena itu saya punya hak untuk memberikan jawaban sesuai dengan pemerintahan yang ada sekarang ini.

P : Apa ada kendala dalam keterbukaan kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa?

N : Nah, ini memang sulit saya sebagai BAMUSKAM itu sudah sering kali melaporkan hal-hal ini ke SKPD terkait. Seperti distrik sebagai pembina tingkat satu saya sudah melaporkan bahkan sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis bahkan juga saya naik ke tingkat yang lebih tinggi untuk menyurati DPMK pemerintahan kabupaten desa. Saya ini menyampaikannya tetapi mereka tidak pernah mempublisnya. Nah itu sebabnya saya tidak setuju pemerintahan ini aparat ini sama sekali tidak terbuka.

P : Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

N : Tidak pernah, tidak ada.

P : Apa saja jenis laporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

N : Sudah empat tahun tidak pernah ada laporan sedikitpun. Selama saya menjabat saya tidak pernah mendapatkan laporan itu.

P : Bagaimana pemerintah desa mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa?

N : Justru itu kami sebagai badan musyawarah kampung telah menyurati instansi terkait untuk mempending sementara waktu tunggu, laporannya jelas dulu. Ini kan bentuk kita punya perhatian untuk penggunaan dana kampung itu.

b. Sekretaris

P : Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa?

N : Untuk pemerintah desa itu untuk pengelolaan transparansinya itu selalu ikuti arahan atau selalu ikuti petunjuk dari Bupati. Itu saja.

P : Apa ada kendala dalam keterbukaan kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa?

N : Tidak ada kendala karena sudah ada yang namanya Musyawarah Kampung.

P : Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

N : Iya pertanggungjawaban sesuai dengan penggunaan. Apa yang digunakan anggaran APBK tahun itu ya itu yang harus dipertanggungjawabkan seperti itu.

P : Apa saja jenis laporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

N : Prosesnya adalah lengkapi penatausahaan itu ya. Penatausahaan penggunaan, dana digunakan untuk apa ya prosesnya penatausahaan.

P : Bagaimana pemerintah desa mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa?

N : Jadi kita mencegahnya dengan cara, pendekatan ya. Misalnya dana ini dikasih (sambil narasumber memberikan amplop yang berisikan sejumlah uang) contoh posyandu. Cara mencegahnya adalah dengan meminta pihak posyandu untuk cepat melaporkannya kembali.

2. Wawancara bersama Kepala Kampung Yoboi mengenai penerapan *Good Corporate Governance*:

P : Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa?

N : Pertama sejak pemerintah kampung ibu ini kan beralihan pemerintahannya dari kampung Yoshiba. Yoboi , Simporo baru Yobeh yang dimana itu disatukan dan sekarang kampung Simporo dan Babrongko ada di sebelah

sana. Sementara itu kampung Yoboi pemekaran jadi saya ini kepala kampung yang keempat jadi selalu dulu ketika pemerintahan tidak pernah sama sekali tidak transparan atau terbuka. Nah pada saat mereka terima dana itu mereka tidak taruh di atas meja di para-para (pondok-pondok) kepala Adat di balai itu. Jadi masyarakat tidak tahu sampai uang itu habis digunakan untuk apa tidak ada yang tau. Setelah saya jadi kepala kampung, saya buat transparansi sesuai aturan.

P : Apa ada kendala dalam keterbukaan kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa?

N : Iya, sebenarnya setelah saya menjalani pemerintahan kampung yang masuk tahun kelima ini, saya melihat bahwa fungsi transparansi itu sangat penting. Cuma persoalannya sekarang yang kami hadapi, masyarakat kita ini tidak siaplah begitu. Jadi ketika mereka mendengar nilai uang kemudian setelah digunakan untuk proses pembangunan seperti ADD ya, itu kan cuma untuk pembangunan fisik dan prasarana infrastruktur. Setelah kita gunakan masyarakat bertanya-bertanya lagi ada sisa uangnya tidak. Akhirnya masyarakat melaporkan kepada pihak kepolisian. Akhirnya kami dipanggil dan dibuktikan tidak bersalah dan kemudian masyarakat yang melapor itu yang jadi malu. Karena dia melaporkan tidak sesuai dengan bukti.

P : Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

N : Iya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus jalankan sesuai dengan Mus rembang. Karena pada saat Mus rembang itu kita sudah rancang-rancang pembiayaannya. Nah bagaimana kita tau rancang-rancang pembiayaannya sebelum Mus rembang kita harus tau volume dana yang dikasih pada tahun yang akan dijalankan itu berapa. Nah berdasarkan itu baru kita rancang-rancang sesuai dengan programnya.

P : Apa saja jenis laporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

N : Iya pertama itu APBK, apakah APBK ada perubahan atau tidak kalau ada perubahan kita lakukan perubahan juga. Yang kedua adalah LKPK setelah LKPK baru MPD setelah MPD baru ada yang namanya LPD.

P : Bagaimana pemerintah desa mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa?

N : Ya selama terakhir pemerintah ini terjadi kecurangan itu sangat sulit karena saya menerapkan itu tadi transparansi. Kemudian saya juga melakukan rapat-rapat baik itu di rumah adat maupun di rumah pribadi disitu saya mengatakan bahwa harus tidak ada celah agar tidak ada korupsi.

3. Wawancara bersama Sekretaris kampung Yahim mengenai penerapan *Good Corporate Governance*:

P : Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa?

N : Iya, selama ini kita memang dari Kabupaten dong bilang mengenai transparansi dan berapa kali ikut kegiatan tersebut. Jadi kampung-kampung di Kabupaten Jayapura termasuk Kampung Yahim ada pasang baliho APBK kita punya program tahun ini kita kerja dana nya sekian-sekian, terus kita tempel di pantai dan sama ada di kantor kampung sini supaya masyarakat bisa lihat.

P : Apa ada kendala dalam keterbukaan kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa?

N : Selama ini kita jalan tidak ada kendala keterbukaan itu.

P : Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

N : Sesuai tadi dengan APBK kita jalankan sesuai dengan arahan dan membuat laporan pertanggungjawaban dan setelah itu kita kasih ke Distrik dan selain Distrik ada Inspektorat keuangan Kabupaten sama DPMK.

P : Apa saja jenis laporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

N : Jadi bentuk laporannya itu dalam bentuk dokumen jadi di dalam dokumen itu sudah ada dokumentasi, kwitansi dll. Kita bikin dan print kemudian jilid jadi satu, baru antar ke Distrik dan kantor Inspektorat Keuangan.

P : Bagaimana pemerintah desa mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa?

N : Kemarin dari Inspektorat datang menemui kami dan memberikan sosialisasi mengenai hal ini, dan menurut kami ini sangat berguna karena kami jadi tau bahwa hal ini tidak boleh dilakukan.

4. Wawancara bersama Kepala Kampung Hobong mengenai penerapan *Good Corporate Governance*:

P : Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa?

N : Ya, jadi setiap dana itu kalau sudah di cairkan itu diserahkan secara terbuka Penyerahannya. Penyerahannya ada dari Distrik dan diserahkan di depan masyarakat.

P : Apa ada kendala dalam keterbukaan kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa?

N : Ya, untuk kendala tidak ada. Karena semua kegiatan sudah ada Mus rembang. Jadi kalau sudah ada Mus rembang tidak ada kendala.

P : Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

N : Ya, jadi setiap dana yang keluar masuk itu semua ada bukti jadi untuk setiap laporan itu berdasarkan bukti itu.

P : Apa saja jenis laporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

N : Untuk semua uang yang keluar ya itu yang dilaporkan.

P : Bagaimana pemerintah desa mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa?

N : Ini yang selalu di jaga sekali. Ada teman-teman atau dari pihak Adat yang ingin menggunakan uang ini. Tapi saya tetap jaga uang ini agar tidak disalahgunakan nanti.

5. Wawancara bersama Tokoh Masyarakat mengenai penerapan *Whistleblowing System*:

P : Apakah Bapa/Ibu pernah melaporkan suatu tindakan kecurangan di kampung ini dengan menggunakan *whistleblowing System*?

N : Tidak

P : Menurut Bapa/Ibu, apa yang mempengaruhi anda dalam melakukan dan tidak melakukan pengaduan atau pelaporan, ketika anda mendapati kecurangan di dalam Kampung ini?

N : Terdapat hubungan Keluarga

P : Menurut Bapa/Ibu apakah di dalam Kampung ini sudah menanamkan nilai “keterbukaan dan kejujuran” pada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di kampung ini?

N : Belum sepenuhnya/tidak maksimal.

P: Menurut Bapa/Ibu, apakah Aparatur Kampung sudah benar-benar berkomitmen dalam mendukung penerapan *whistleblowing* apabila mendapatkan temuan berupa kecurangan dana kampung?

N : Masih kurang tau

P : Menurut Bapa/Ibu, apakah penerapan *whistleblowing* di dalam Kampung sudah efektif atau belum? Apakah anda mempunyai saran dalam mengembangkan *whistleblowing system* dalam kampung?

N : Tidak ada.

LAMPIRAN 3

Hasil Uji Deskriptif

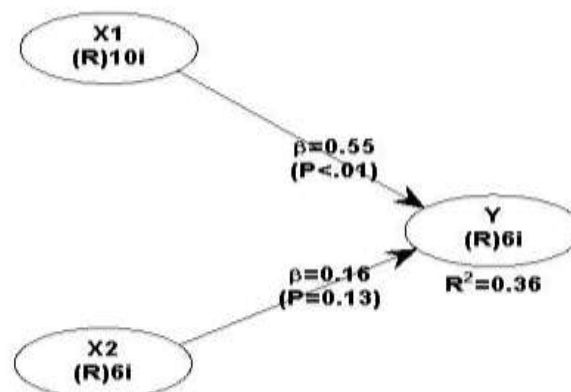
Descriptive Statistics

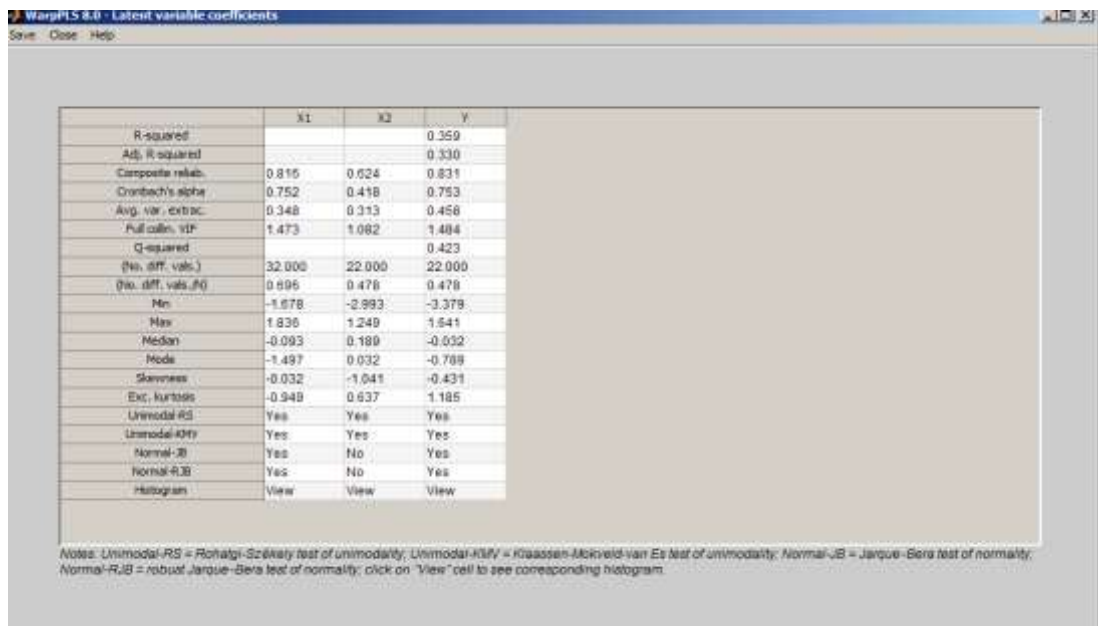
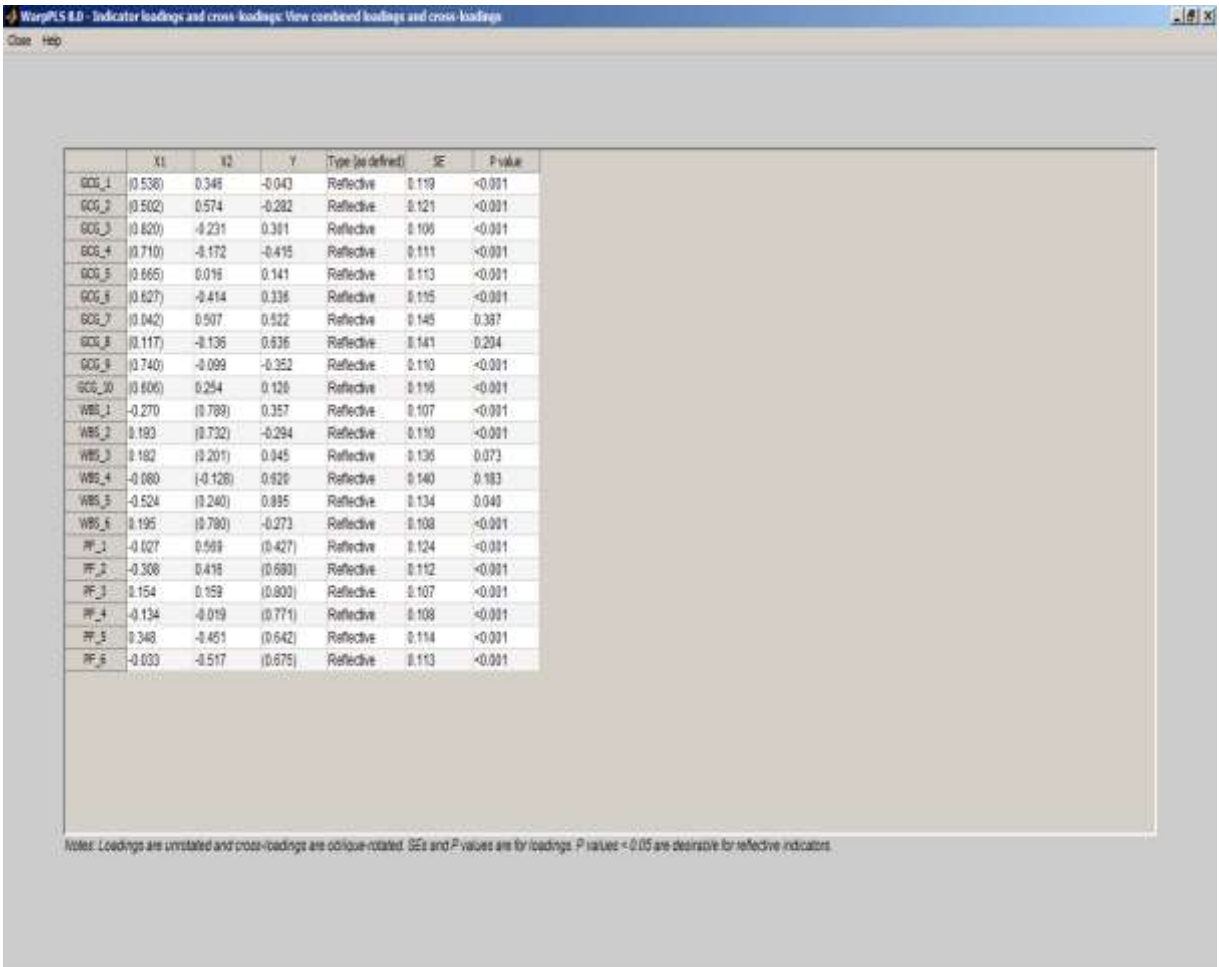
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GCG	46	34.00	50.00	40.8043	3.90225
WBS	46	17.00	27.00	23.3478	2.04632
PF	46	18.00	30.00	25.9348	2.52457
Valid N (listwise)	46				

LAMPIRAN 4

Hasil Output WarpPLS 8.0

Sebelum Penghapusan Indikator





WarpPLS 8.0 - Path coefficients and P values

Close Help

Path coefficients

	X1	X2	Y
X1			
X2			
Y	0.549	0.156	

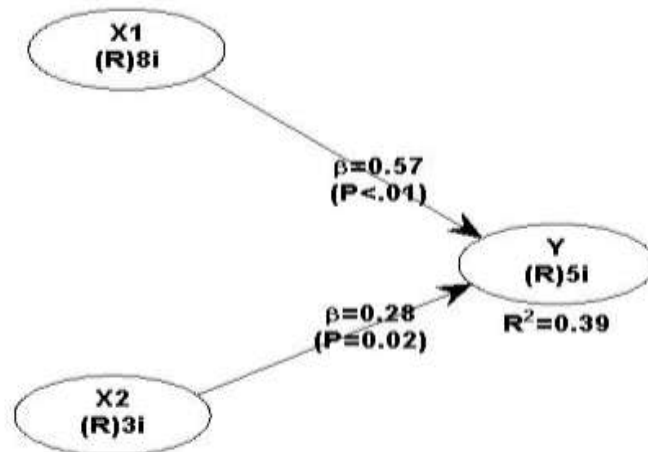
P values

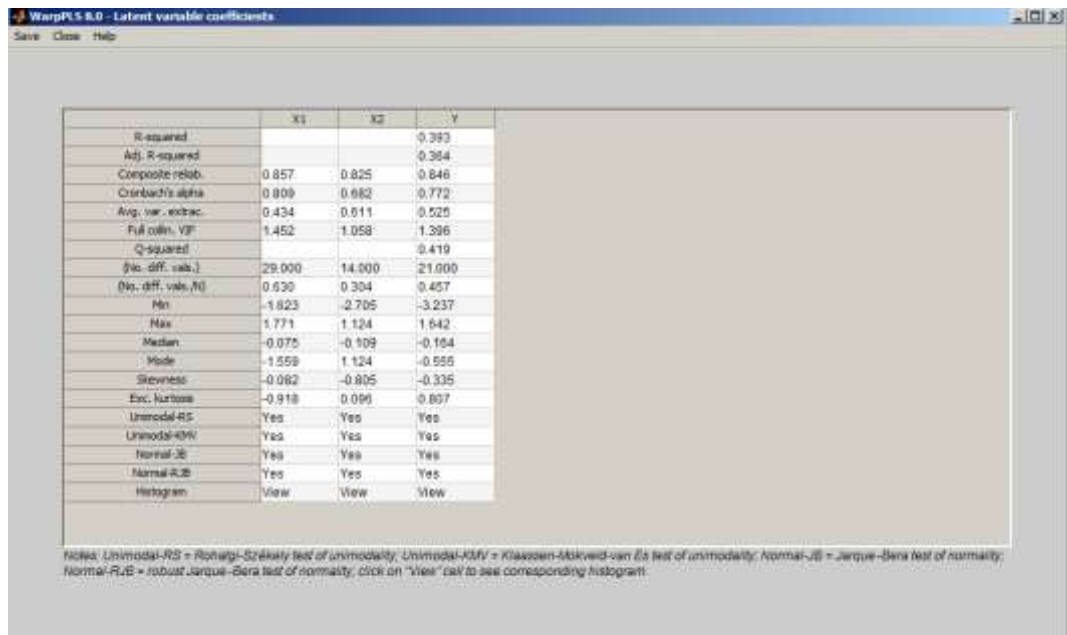
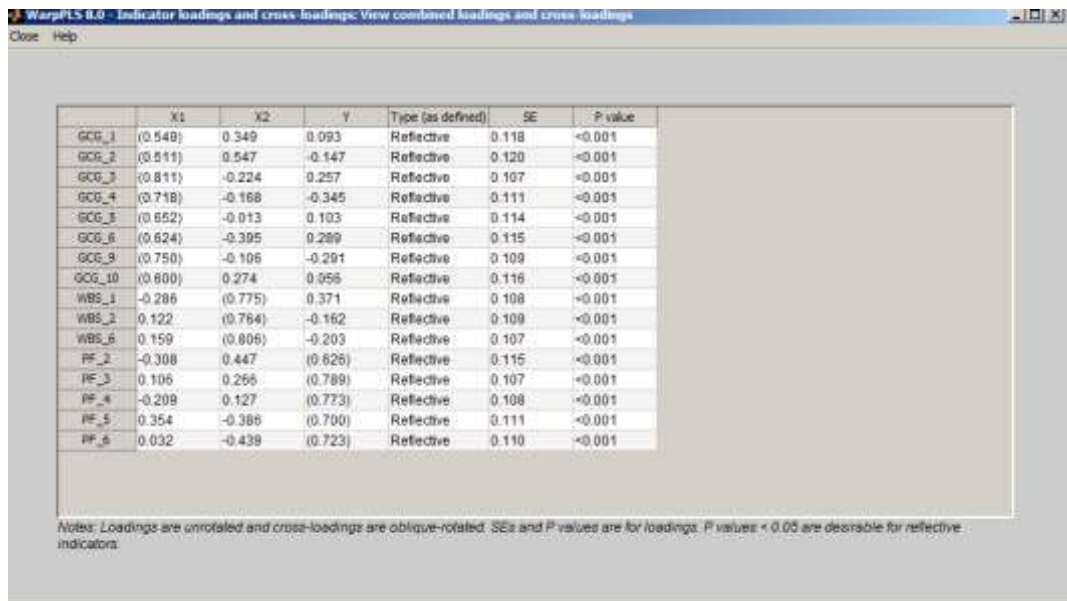
	X1	X2	Y
X1			
X2			
Y	<0.001	0.134	

LAMPIRAN 5

Hasil Output WarpPLS 8.0

Sesudah Penghapusan Indikator





The screenshot shows the WarpPLS 8.0 interface with two tables. The first table, 'Path coefficients', shows a path coefficient of 0.569 from X1 to Y and 0.281 from X2 to Y. The second table, 'P values', shows a p-value of <math><0.001</math> for the path from X1 to Y and 0.019 for the path from X2 to Y.

Path coefficients			
	X1	X2	Y
X1			
X2			
Y	0.569	0.281	

P values			
	X1	X2	Y
X1			
X2			
Y	<math><0.001</math>	0.019	

LAMPIRAN 6

Hasil Uji Hipotesis

Variabel Penelitian	<i>Path Coefficients</i>	<i>P-Value</i>	Keterangan
<i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	0.569	<math><0.001</math>	Diterima
<i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	0.281	0.019	Diterima